



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYA EFITRIMEN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 458734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA
AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000
5. MOBIL, NISSAN SERENA 2.0 HWS AT Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 225.000.000
6. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 41.181.511

F. HARTA LAINNYA Rp. 145.500.000

Sub Total Rp. 1.939.181.511



III. HUTANG

Rp. 134.877.827

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.804.303.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAMDAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **441165**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
4. Tanah Seluas 19829 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 2650 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
6. Tanah Seluas 249.6 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **165.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS LOW SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	382.517.306
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.350.817.306
III. HUTANG	Rp.	247.370.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.103.447.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONS MANEDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 648030

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	82.000.000
1. MOBIL, AVANZA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	94.000.000

III. HUTANG Rp. 45.596.120

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 48.403.880

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MEDO PATRIA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 641762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	525.500.000
III. HUTANG	Rp.	225.089.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	300.410.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ORY SATIVA SYAKBAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 648072

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	740.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/15 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, WARISAN Rp. 280.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	249.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, YARIS 1.5 S CVT 1.5 S CVT/ TOYOTA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	87.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.277.000.000
III. HUTANG	Rp.	240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.037.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 November 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRZAL ZAMZAMI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 631583

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/188 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.984.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	625.784.000
III. HUTANG	Rp.	35.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	590.784.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.